

LAPORAN PENELITIAN

**DOKUMENTASI
UNIVERSITAS TERBUKA**

**SUMBANGAN PENERIMAAN PAJAK
DARI SEKTOR MIGAS DAN NON MIGAS
TERHADAP PENGELUARAN PEMERINTAH
PERIODE 1969/1970 SAMPAI DENGAN 1990**

Oleh:

**Dra. Sri Riyanti B.N
NIP. 131569930**

UNIVERSITAS TERBUKA

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TERBUKA
1993**

LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : Sumbangan Penerimaan Pajak Dari Sektor Migas dan Non Migas Terhadap Pengeluaran Pemerintah Periode 1969/1970 Sampai Dengan 1990.
- b. Macam Penelitian : Korelatif/Kausal
- c. Kategori Penelitian : Menunjang Modul Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka.
-
2. Peneliti
- a. Nama Lengkap : Dra. Sri Riyanti B.N
- b. NIP : 131569930
- c. Jenis Kelamin : Perempuan
- d. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I/III/b
- e. Jabatan : Asisten Ahli
- f. Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Ekonomi Dan Studi Pembangunan
- g. Universitas : Universitas Terbuka
- h. Bidang ilmu yang diteliti : Ekonomi dan Studi Pembangunan
-
3. Pembimbing : Prof. Dr. Wan Usman, MA
-
4. Lokasi Penelitian : Universitas Terbuka
-
5. Jangka waktu penelitian : Tiga (3) bulan
-
6. Biaya Penelitian : Rp 350.000,-
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Jakarta, 18 Januari 1993

Menyetujui:
Pembimbing,



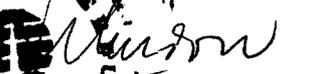
Prof. Dr. Wan Usman, MA
NIP. 130178688

P e n e l i t i,



Dra. Sri Riyanti B.N
NIP. 131569930

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ekonomi



G.M. Widodo
NIP. 130175196

Kepala Puslitabmas,



Dr. Aria Djalil
NIP. 130364776



R I N G K A S A N**1) Penerimaan Migas**

Pada awal Pelita I 1969/1970 penerimaan migas mencapai sebesar Rp 65,8 milyar atau sekitar 27% dari seluruh penerimaan dalam negeri, maka pada akhir Pelita II telah meningkat menjadi Rp 2.308,7 milyar atau 54,1% dari seluruh penerimaan dalam negeri. Peningkatan harga minyak tersebut berlangsung terus hingga mencapai harga tertinggi sebesar US \$ 35,00 per barel pada tahun 1981.

Selama Pelita III penerimaan minyak bumi dan gas alam dalam tahun 1981/1982 mencapai sekitar 70% dari seluruh penerimaan dalam negeri. Memasuki Pelita IV penerimaan migas menunjukkan perkembangan yang berbeda yaitu harga minyak di pasaran internasional mulai melemah sejak tahun 1982, dan bahkan mencapai harga terendah yaitu sebesar US \$ 9,83 per barel dalam tahun 1986. Penurunan harga minyak mentah di pasaran dunia tersebut mendorong negara-negara OPEC untuk menyepakati penentuan quota produksi bagi masing-masing negara anggota sehingga hasilnya harga minyak mulai mantap kembali dan untuk Indonesia penerimaan migas mencapai Rp 10.047,2 milyar dalam tahun 1987/1988.

Beberapa anggota OPEC tidak mematuhi kesepakatan quota produksi akibatnya penerimaan migas tahun 1988/1989 hanya mencapai Rp 9.527,0 milyar.

2) Penerimaan Non Migas

Penerimaan negara di luar minyak bumi dan gas alam telah direalisasikan oleh pemerintah melalui pembaharuan di bidang perpajakan. Untuk penerimaan

dalam negeri dari sektor perpajakan meningkat dari sebesar Rp 174,8 milyar dalam tahun 1969/1970 (awal Pelita I) menjadi sebesar Rp 729,9 milyar pada tahun 1974/1975 (awal Pelita II). Penerimaan terus meningkat hingga pada tahun 1988/1989 (akhir Pelita IV) mencapai sebesar Rp 11.908,5 milyar.

Selanjutnya dalam APBN 1989/1990 penerimaan berupa pajak direncanakan sebesar Rp 14.909,6 milyar atau 25,2% dibandingkan dengan penerimaan pajak dalam tahun 1988/1989.

3) Pengeluaran Pemerintah

Pertumbuhan pengeluaran pemerintah, dari Pelita I sampai dengan Pelita V menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh pembayaran kembali hutang luar negeri, disamping semakin besarnya dukungan pembiayaan yang diperlukan bagi pendayagunaan aparatur pemerintah.

- Dalam struktur penerimaan Pelita I, ada pergeseran dalam komponen penerimaan dalam negeri dari penerimaan minyak bumi dan gas alam kepada penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 967,7 milyar yang terdiri dari penerimaan minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 362,2 milyar atau 39,5 persen dari total penerimaan dalam negeri dan penerimaan di luar minyak dan gas alam sebesar Rp 585,5 milyar atau 60,5 persen dari keseluruhan penerimaan dalam negeri.

- Pada Pelita II tahun pertama dimana 54,6 persen dari pada penerimaan dalam negeri merupakan penerimaan minyak bumi dan gas alam yaitu sebesar Rp 957,2 milyar, sedangkan yang 45,4 persen atau sebesar Rp 796,5 milyar merupakan penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam. Dalam tahun 1985/1986 yang merupakan tahun kedua Pelita IV, penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam mencapai 57,9 persen dari seluruh penerimaan dalam negeri.
- Dalam tahun 1986 harga minyak bumi turun drastis dan penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam sebagai hasil dari pembaharuan perpajakan.
- Tahun 1986/1987 dari keseluruhan penerimaan dalam negeri 60,7 persen merupakan penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam, sedangkan penerimaan minyak bumi dan gas alam sebesar 39,3 persen.
- Dalam APBN 1989/1990 penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam direncanakan sebesar 31,3 persen dari penerimaan dalam negeri.

4) Pembayaran Bunga dan Cicilan Pokok

- Dalam tahun pertama Pelita I beban pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri baru mencapai sebesar 5,9 persen dari anggaran belanja rutin.
- Tahun 1986/1987 beban pembayaran kembali pinjaman luar negeri menyerap lebih dari sepertiga anggaran belanja rutin.

- Tahun anggaran 1988/1989 pembayaran hutang luar negeri meningkat mencapai 52,4 persen, sehingga memberikan tekanan yang cukup berat terhadap APBN dan neraca pembayaran.
- Karena beban pembayaran kembali hutang luar negeri telah menyebabkan peningkatan pengeluaran rutin dalam jumlah yang cukup besar maka tabungan pemerintahpun sebagai sumber dana pembangunan menjadi terbatas.
- Akibat lain adalah meningkatnya rasio pembayaran hutang luar negeri terhadap ekspor (debt service ratio).

5) Perbandingan Pembayaran Bunga Terhadap Pengeluaran Rutin

Dalam tahun pertama Pelita I yaitu 1969/1970 pembayaran bunga dibiayai 10% dari pengeluaran rutin. Pada tahun 1989 pembayaran bunga dibiayai dari pengeluaran rutin sebanyak kurang lebih 60%.

KATA PENGANTAR

Penelitian ini dilakukan sebagai latihan untuk meningkatkan kemampuan penulis dalam menganalisis masalah yang ada, terutama berkaitan dengan masalah, penerimaan pemerintah yaitu berapa besar sumbangan pajak dan sub sektor non migas terhadap pengeluaran pemerintah dan trendnya.

Juga berapa besar sumbangan pajak dari sektor migas terhadap pengeluaran pemerintah dan bagaimana trendnya, serta berapa besar proporsi pembayaran cicilan pokok dan bunga hutang luar negeri dari pengeluaran rutin pemerintah, selama kurun waktu ± dari Pelita I (1969/1970 sampai dengan Pelita V 1989/1990). Hasil penelitian ini diharapkan juga bisa memperkaya modul Ekonomi Pembangunan yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka.

Pada kesempatan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Dra. CM. Widodo yang bertindak sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka.
- 2) Prop.Dr. Wan Usman, MA yang bertindak sebagai pembimbing dalam pembuatan penelitian ini.
- 3) DRS. I.N. Baskara, yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini.

Semoga hasil penelitian ini berguna bagi pembeda.

Jakarta, 18 Januari 1993

P e n u l i s,

(Dra. Sri Riyanti B.N.)

D A F T A R I S I

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
PENDAHULUAN	
Latar Belakang	1
Perumusan Masalah	4
TINJAUAN PUSTAKA	
Kegiatan Pemerintah dan Belanja Rutin	5
Belanja Rutin dan Pendapatan Rutin	6
Belanja Rutin dan ICW	6
Current Account dan Capital Account	7
Pengeluaran Rutin	8
Pembiayaan Aparatur Pemerintah	9
Pembiayaan Operasional dan Pemeliharaan	12
Pembiayaan Bunga dan Cicilan Hutang	12
Subsidi dan Lain-Lain	14
Tabungan Pemerintah	16
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
Tujuan Penelitian	18
Manfaat Penelitian	18
METODE PENELITIAN	19

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN	
Penerimaan Migas	20
Penerimaan Non Migas	22
Pembayaran Bunga dan Cicilan Pokok	25
Perbandingan Pembayaran Bunga terhadap Pengeluaran Rutin	28
KESIMPULAN DAN SARAN	
Kesimpulan	30
Saran	33
DAFTAR PUSTAKA	34
L A M P I R A N	35

UNIVERSITAS TERBUKA

P E N D A H U L U A N

1. Latar Belakang

Pada modul matakuliah Ekonomi Pembangunan dari Fakultas Ekonomi UT, diantaranya menguraikan tentang bagaimana pemerintah membiayai pengeluarannya untuk pembangunan negaranya. Pembiayaan pengeluaran itu didapat dari penerimaan pajak yang masing-masing dari sektor migas dan non migas. Namun di dalam pembahasannya masih kurang contoh-contoh yang berkaitan dengan penelitian tentang seberapa besarkah sumbangan penerimaan pajak dari sektor migas dan non migas terhadap pengeluaran pemerintah Indonesia sekarang makin berkembang dengan adanya perkembangan itu memerlukan biaya yang makin besar untuk penyelenggaraan pemerintahan. Sejalan dengan perkembangan tersebut yaitu perekonomian dunia maupun perekonomian dalam negeri, maka struktur penerimaan negara maupun struktur pengeluaran negara juga berubah dari tahun ke tahun.

Pada awal Pelita I, penerimaan negara lebih banyak didukung oleh penerimaan dari sektor perpajakan, karena masih belum berperannya penerimaan dari minyak bumi dan gas alam. Memasuki Pelita II, ketika harga minyak bumi mulai membaik maka titik berat struktur penerimaan negara bergeser dari penerimaan berbagai jenis pajak dan penerimaan dari sektor-sektor non migas dan hal ini berlanjut sampai dengan Pelita III. Sebagai akibat semakin meningkatnya penerimaan dari sektor migas sejalan dengan peningkatan harga minyak bumi di pasaran

dunia. Penerimaan negara di luar migas menjadi jauh tertinggal oleh laju perkembangan penerimaan minyak. Memasuki Pelita IV, penerimaan negara dari sektor migas berkurang kembali. Hal ini disebabkan oleh lemahnya harga minyak dunia sebagai akibat meningkatnya produksi minyak mentah, khususnya oleh negara-negara non OPEC dan makin efisiennya pemakaian bahan bakar minyak yang selanjutnya mempengaruhi permintaannya. Penurunan harga tersebut pada akhirnya menyebabkan menurunnya penerimaan negara. Menyadari bahwa ketergantungan kepada penerimaan minyak dan gas alam yang sangat besar adalah kurang baik bagi kelanjutan pembangunan maka diupayakan agar penerimaan non migas, khususnya dari sektor pajak dapat ditingkatkan untuk menggantikan peranan penerimaan migas, untuk dapat mencukupi biaya rutin (pengeluaran pemerintahan) maka diharapkan terjadi kenaikan penerimaan pajak dari sektor non migas.

Pengeluaran Rutin 1969/1970 - 1989/1990
(dalam milyar rupiah)

Tahun Anggaran	Pengeluaran Pemerintah	Pajak Migas (Penerimaan)	Pajak Non Migas (Penerimaan)
Pelita I			
1969/1970	21,5	65,8	174,8
1970/1971	288,2	99,2	232,3
1971/1972	349,1	140,7	259,8
1972/1973	438,1	230,5	325,5
1973/1974	713,3	382,2	535,7
Pelita II			
1974/1975	1.016,1	957,2	729,9
1975/1976	1.332,6	1.248,0	883,5
1976/1977	1.629,8	1.635,3	1.152,2
1977/1978	2.146,9	1.948,7	1.443,1
1978/1979	2.743,7	2.306,7	1.766,0
Pelita III			
1979/1980	4.061,6	4.259,6	2.249,9
1980/1981	5.800,0	7.019,6	2.891,7
1981/1982	6.977,6	8.627,8	3.248,4
1982/1983	6.996,3	8.170,4	3.812,3
1983/1984	8.411,8	9.520,0	4.393,5
Pelita IV			
1984/1985	9.429,0	10.429,9	4.788,3
1985/1986	11.951,5	11.144,4	6.616,9
1986/1987	13.559,9	6.337,6	7.645,7
1987/1988	17.461,5	10.047,2	8.779,4
1988/1989	20.739,0	9.527,0	11.908,5
Pelita V			
1989/1990	23.445,0	7.899,7	14.909,6

Dari data di atas belum menunjukkan secara jelas seberapa besarkah perubahan proporsi masing-masing sektor terhadap pengeluaran pemerintah dari trend penerimaan pajak dari masing-masing sub sektor non migas.

Dengan mengetahui proporsi trend penerimaan pajak dari sub sektor migas dapat diketahui sub sektor non migas yang mampu dan diharapkan dapat membiayai kenaikan pengeluaran pemerintah.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Berapa besar sumbangan pajak dari sub sektor non migas terhadap pengeluaran pemerintah dan bagaimana trendnya.
- b. Berapa besar sumbangan pajak dari sektor migas terhadap pengeluaran pemerintah dan bagaimana trendnya.
- c. Berapa besar proporsi pembayaran cicilan pokok dan bunga hutang luar negeri dari pengeluaran rutin pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kegiatan Pemerintah dan Belanja Pemerintah

Dengan makin meningkatnya jumlah penduduk, makin bertambahnya kebutuhan masyarakat karena kemajuan teknologi, kemajuan ilmu meningkatnya kerjasama dan hubungan internasional serta lain-lain kemajuan, maka kegiatan pemerintah menunjukkan kecenderungan bahwa makin lama juga makin meningkat. Kegiatan pemerintah yang makin meningkat tersebut nampak dalam belanja pemerintah yang setiap tahun hampir selalu mengalami kenaikan. Meskipun hendaknya selalu disadari bahwa meningkatnya kegiatan-kegiatan tersebut tidak selalu harus dibarengi dengan meningkatnya belanja atau pengeluaran pemerintah. Penggunaan gedung dan peralatan kantor yang telah tersedia, pegawai pemerintah atau pegawai negeri yang telah diangkat, jam-jam kantor dan waktu kerja yang belum dimanfaatkan secara efektif dapat ditingkatkan penggunaan dan kegiatannya tanpa harus disertai dengan peningkatan belanja pemerintah. Sebaliknya peningkatan belanja atau pengeluaran pemerintah belum berarti atau tidak selalu berarti pula meningkatnya kegiatan pemerintah.

Tingkat inflasi yang cepat dengan meningkatnya belanja pemerintah dan berarti pula belanja riil atau belanja nyata pemerintah yang menurun mungkin disertai dengan menurunnya kegiatan pemerintah, seperti kegiatan pembangunan dan kegiatan inspeksi yang banyak membutuhkan uang.

2. Belanja Rutin dan Pendapatan Rutin

Dengan belanja rutin yang diharapkan makin tahun juga meningkat karena tugas pemerataan makin meningkat, maka pendapatan atau penerimaan (revenue) untuk menutup belanja rutin tersebut hendaknya makin tahun juga makin meningkat. Pendapatan rutin tersebut intinya atau isinya terutama adalah pemungutan pajak (taxation).

Hukum Wagner dalam pengeluaran negara juga diikuti oleh hukum Wagner dalam penerimaan atau pendapatan negara. Sementara itu oleh kaidah yang berusaha menjelaskan kenapa pengeluaran pemerintah harus meningkat dengan meningkatnya aktivitas perekonomian (diukur dengan tingkat pendapatan). Kaidah ini dikenal sebagai hukum Wagner (1883), menjelaskan adanya korelasi positif antara pengeluaran pemerintah dan tingkat pendapatan.

3. Belanja Rutin dan ICW

ICW (Indonesische Comptabiliteit Wet) adalah salah satu undang-undang kolonial yang sampai sekarang masih berlaku. ICW merupakan salah satu sumber hukum bagi penyusunan RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) di samping Kepres No. 14 tahun 1979, Kepres No, 14A tahun 1980 dan seterusnya.

Menurut ICW yang berlaku sejak tahun 1864 berikut perubahan-perubahan dan penyempurnaan-penyempurnaannya yang sekarang dinamakan belanja rutin bersumber apa

yang dinamakan dinas atau belanja biasa. Dinas biasa meliputi antara lain belanja pegawai, belanja barang, dan belanja pemeliharaan. Jadi belanja-belanja yang ditujukan untuk kegiatan pemerintahan sehari-hari atau kegiatan rutin. Untuk menutup belanja rutin tersebut juga digunakan sumber penerimaan rutin dan yang terutama adalah perpajakan. Adapun untuk membiayai belanja pembangunan atau yang menurut ICW dinamakan belanja luar biasa (*buster gewone dienst*) atau belanja modal (*kapital dienst*) seperti untuk membiayai pembangunan, jalan, pembangunan jembatan dan pembangunan bendungan berasal dari pinjaman yang nantinya diperhitungkan dan dapat dibiayai dengan kenaikan penerimaan pajak yang ditimbulkan karena belanja modal tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi memang disengaja dan diperhitungkan untuk dibebankan pada generasi mendatang atau masa masa mendatang. Adapun logikanya dapat diduga karena generasi tersebut mendapat manfaat dari barang-barang modal yang dibangun tersebut. Biaya atau belanja rutin hendaknya dapat ditutup dengan pendapatan rutin.

4. Current Account dan Capital Account

Perbedaan antara belanja rutin dan belanja pembangunan ialah apa yang di Amerika Serikat dinamakan Current Account atau rekening berjalan dan Capital Account, atau rekening modal current account juga kira-kira menyangkut pengeluaran seperti dalam belanja rutin, sedangkan capital account meliputi pembelian

gedung, pembelian kendaraan, pembuatan jalan dan sebagainya. Apabila belanja pembangunan di negara kita dikelola oleh pemerintah atau badan-badan pemerintah seperti PN Bina Marga dan Jatiluhur (oleh suatu proyek) maka di Amerika Serikat dikelola oleh misalnya Trust Funds untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan dan TVA (Tennese Valey Authority) bagi bendungan dan proyek raksasa lain seperti pembangkit tenaga listrik dan pemeliharaan hutan. Apabila belanja rutin dan belanja pembangunan lebih menyangkut perbendaharaan negara maka current account dan capital account lebih menyangkut sistem accounting atau sistem pembukuan. Meskipun kedua-duanya mempunyai kaitan yang erat.

- Pengeluaran Rutin

Sebagai salah satu perangkat kebijaksanaan keuangan negara, anggaran belanja rutin memegang peranan yang sangat penting di dalam mendukung kelancaran mekanisme sistem pemerintahan dan upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas nasional. Sejalan dengan perkembangan volume kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat dari pada kemajemukan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan, maka jumlah peranan pengeluaran rutin dalam APBN telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya pembayaran kembali hutang luar negeri, disamping semakin besarnya dukungan pembiayaan yang diperlukan bagi pendayagunaan aparatur pemerintah, pengoperasian,

pengawasan dan pemeliharaan prouek-proyek pembangunan yang telah selesai dibangun, serta subsidi untuk menjaga kestabilan harga dan ekonomi.

1. Pembiayaan Aparatur Pemerintah (Pegawai)

Pembiayaan aparatur pemerintah sebagian besar dialokasikan melalui belanja pegawai bagi aparatur pemerintah pusat dan subsidi daerah otonom bagi aparatur pemerintahan daerah. Sebagai salah satu unsur penunjang usaha pendayagunaan dan pengembangan aparatur pemerintah, pembiayaan aparatur di arahkan untuk memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas dan kemampuan profesionalisme serta penyempurnaan seluruh unsur aparatur pemerintah, agar terwujud administrasi pemerintahan yang tertib, bersih dan berwibawa dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan.

Dalam rangka menyesuaikan sistem penggajian pegawai dengan perkembangan keadaan, telah dilakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap peraturan gaji pegawai negeri sipil (PGSP) 1968 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967, dengan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1985.

Dengan berlakunya ketentuan baru tersebut, maka gaji pokok pegawai negeri sipil tersebut telah mengalami peningkatan sebanyak 83 kali lipat dari gaji pokok pegawai negeri sipil terendah menurut PGSP 1968.

Sedangkan gaji pokok pegawai negeri sipil tertinggi telah mengalami peningkatan sebanyak 27 kali lipat dari gaji pokok pegawai negeri sipil terendah dan gaji pokok pegawai negeri sipil tertinggi yang menurut PGSP-1968 adalah 1 berbanding 25, yaitu Rp 400,00 untuk terendah berbanding Rp 10.000,00 bagi berbanding tertinggi per bulan, telah diperkecil menjadi hanya 1 berbanding 8, yaitu Rp 33.200,00 bagi pegawai terendah berbanding Rp 265.000,00 bagi pegawai tertinggi.

Meskipun sistem penggajian pegawai tersebut telah mengalami beberapa kali penyesuaian dan penyempurnaan, namun pada hakekatnya hal itu tidaklah mengubah esensinya sebagai kombinasi antara gaji pokok dan berbagai macam tunjangan.

Tunjangan tersebut antara lain:

- Tunjangan keluarga
- Tunjangan kemahalan daerah
- Tunjangan penyesuaian indeks harga
- Tunjangan keahlian resiko pekerja khusus bagi pegawai negeri yang ditempatkan di beberapa wilayah itu, seperti Irian Jaya dan Timor-Timur.
- Tunjangan struktural bagi pemangku jabatan struktural
- Tunjangan fungsional bagi pemangku profesi tertentu seperti: guru, peneliti, hakim, penyuluh, tenaga mekanis dan tenaga para medis.

Bersama-sama dengan pelbagai perangkat peraturan kepegawaian lainnya sistem penggajian sangat mempengaruhi tingkat penghasilan pegawai ini untuk mendukung usaha perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri pusat dan pegawai negeri daerah otonom serta

para penerima pensiun, pemerintah senantiasa mengusahakan kenaikan gaji dan pensiun, sejauh keadaan keuangan negara memungkinkan sejak awal awal Pelita I telah dilakukan beberapa kali kenaikan gaji, baik berupa pemberian gaji bulan ketiga belas ataupun kenaikan gaji secara menyeluruh.

Disamping kenaikan gaji dan pensiun, perbaikan penghasilan pegawai juga diupayakan melalui sistem insentif, antara lain dengan mengembangkan sistem pemberian tunjangan fungsional dan tunjangan struktural bagi pemangku jabatan tertentu, seperti: Jabatan Kepala dan Pemilih Sekolah pada sekolah negeri, yang sebelumnya tidak diberikan. Selain daripada itu juga dilakukan melalui pemberian kenaikan pangkat otomatis dan penerapan sistem alkreditasi dalam kenaikan pangkat. Selanjutnya, belanja pegawai juga dipengaruhi oleh besarnya tunjangan beras, uang makan dan lauk-pauk dan lain-lain. Belanja pegawai dalam negeri dan belanja pegawai luar negeri.

Selain belanja pegawai, pembiayaan aparatur pemerintah juga mencakup alokasi anggaran bagi belanja pegawai daerah otonom yang merupakan bagian daripada subsidi kepada daerah. Dengan keadaan tersebut di atas, maka secara nasional jumlah pembiayaan bagi aparatur pemerintah juga terus mengalami peningkatan sesuai dengan perkembangan belanja pegawai dan subsidi daerah otonom yang disediakan bagi belanja pegawai. Namun demikian peranan pembiayaan aparatur terhadap anggaran belanja rutin secara keseluruhan itu cenderung mengalami penurunan, oleh karena belanja lebih lambat daripada pengeluaran rutin secara keseluruhan.

2. Pembiayaan Operasional dan Pemeliharaan

Sebagai salah satu mata rantai di dalam kebijaksanaan keuangan negara, kebijaksanaan belanja barang diarahkan untuk menunjang tercapainya pelaksanaan tugas pemerintah. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi di dalam pembelian barang-barang bagi kebutuhan administrasi dan peralatan kantor pemerintah, sehingga tercapai dayaguna (efisiensi) dan hasilguna (efektivitas) yang optimal atas setiap pengeluaran negara yang dikeluarkan berupa belanja barang.

Sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan yang memerlukan pembiayaan bagi kegiatan operasional dan pemeliharaan bagi proyek-proyek yang telah selesai dibangun dan pengolahan kekayaan negara, maka sampai dengan tahun terakhir Pelita IV belanja barang telah mengalami peningkatan sekitar 30 kali lipat bila dibandingkan dengan jumlah anggaran yang diperlukan bagi kegiatan yang sama pada awal Pelita I.

3. Pembayaran Bunga dan Cicilan Hutang

Pengeluaran rutin menampung pembiayaan operasional dan pemeliharaan, pengeluaran rutin juga menampung pembiayaan bagi pembayaran kembali bunga dan cicilan hutang luar negeri. Kewajiban tersebut timbul sebagai akibat dan pemanfaatan bantuan luar negeri selama ini, untuk lebih mempercepat penggunaan sumber-sumber daya ekonomi bagi kepentingan pembangunan nasional,

khususnya untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Dengan demikian pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri tersebut pada hakekatnya merupakan kontra prestasi atas diterimanya sumber-sumber dana luar negeri yang telah dipakai untuk meningkatkan kemampuan di dalam pembangunan perbagai sektor ekonomi guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Semula pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri hanyalah merupakan bagian yang kecil daripada anggaran belanja negara, namun dalam beberapa tahun terakhir ini beban pembayaran kembali pinjaman luar negeri tersebut telah mengalami peningkatan yang cukup tajam, sehingga menjadi unsur terbesar di dalam anggaran belanja rutin.

Dalam tahun pertama Pelita I beban pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri baru mencapai sebesar 5,9% dari anggaran belanja rutin. Namun sejak tahun anggaran 1986/1987, beban pembayaran kembali pinjaman luar negeri tersebut telah menyerap lebih dari sepertiga anggaran belanja rutin, bahkan dalam tahun anggaran 1988/1989 pembayaran hutang luar negeri telah mencapai 52,4 persen. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perubahan nilai tukar antara valuta, yaitu depresiasi dolar Amerika terhadap Yen Jepang, Mark Jerman, dan beberapa mata uang ketat lainnya, adanya devaluasi rupiah sebesar 38,0 persen dalam tahun 1983 dan sebesar 45,0 persen dalam tahun 1986, disamping meningkatnya jumlah pembayaran kembali hutang luar negeri yang jatuh tempo. Perkembangan tersebut telah memberikan tekanan yang cukup berat terhadap APBN

dan neraca pembayaran. Oleh karena beban pembayaran kembali hutang luar negeri telah menyebabkan peningkatan pengeluaran rutin dalam jumlah yang cukup besar, maka tabungan pemerintah yang dapat dihimpun sebagai sumber dana pembangunan juga menjadi terbatas, khususnya karena penerimaan dalam negeri menurun dengan tajam akibat penurunan harga minyak bumi dalam tahun 1986.

Dari sudut neraca pembayaran, peningkatan kewajiban pembayaran hutang luar negeri disatu pihak, dan penurunan nilai ekspor secara keseluruhan karena menurunnya nilai ekspor minyak bumi dan gas alam di lain pihak, telah mengakibatkan meningkatnya rasio pembayaran hutang luar negeri terhadap ekspor (debt-service-ratio). Meskipun demikian pembayaran kembali bunga dan cicilan pokok hutang luar negeri tersebut tetap mendapat prioritas tinggi dalam pengeluaran negara, oleh karena penangguhan atau penundaan pembangunan pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri tidak hanya akan memperberat beban anggaran belanja negara di kemudian hari tetapi juga akan menurunkan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, serta menimbulkan masalah-masalah lain yang telah merugikan pembangunan ekonomi di masa depan.

4. Subsidi dan Lain-lain

Untuk mengatasi fluktuasi di dalam perekonomian, seringkali diperlukan campur tangan (keterlibatan) pemerintah untuk mendorong tercapainya stabilitas

ekonomi, terutama kestabilan harga bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat pada tingkat yang terjangkau oleh daya beli konsumen di dalam negeri. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pemberian subsidi terhadap harga beberapa kebutuhan pokok masyarakat. Akan tetapi karena setiap peningkatan subsidi dapat diartikan sebagai pengurangan dana-dana bagi pembangunan, maka subsidi-subsidi tersebut diberikan dalam batas-batas kewajaran, serta dengan tingkat kemampuan keuangan negara.

Salah satu jenis subsidi yang besar pengaruhnya terhadap anggaran belanja rutin adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM). Subsidi jenis ini diberikan oleh karena BBM merupakan sumber energi yang memiliki fungsi cukup strategis bagi penggerak roda kegiatan ekonomi nasional dan dalam menunjang stabilitas ekonomi. Besarnya subsidi BBM pada dasarnya tergantung kepada 2 hal pokok, yaitu: jumlah kegiatan bersih BBM dalam negeri di satu pihak, dan jumlah biaya pokok pengadaan BBM dilain pihak, yang antara lain terdiri dari biaya pembelian minyak mentah, biaya pengolahan, dan biaya distribusi keseluruhan wilayah Indonesia.

Subsidi BBM tersebut pertama kali timbul dari tahun 1977/1978, pada saat harga minyak mentah sebesar US \$ 13,55 per barel, dan terus mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan harga minyak mentah di pasaran internasional hingga mencapai tingkat tertinggi dalam tahun 1981/1982 pada saat harga minyak mentah mencapai US \$ 35,00 per barel.

Disamping subsidi BBM, pemerintah juga pernah memberikan subsidi pangan antara lain berupa subsidi beras, dan subsidi impor gandum. Subsidi beras tersebut pernah mencapai tingkat tertinggi, yaitu sebesar Rp 281,7 milyar dalam tahun 1980/1981. Sejak tahun 1983/84 subsidi beras tidak lagi disediakan. Bahkan dengan melimpahnya produksi dan persediaan beras nasional, dalam tahun 1986/1987 pemerintah terus menyediakan biaya bagi penyimpanan cadangan pangan di berbagai daerah.

5. Tabungan Pemerintah

Tabungan pemerintah mencerminkan bagian dari pembiayaan pembangunan yang berasal dari sumber dalam negeri. Ini berarti bahwa tabungan pemerintah harus dapat ditingkatkan agar dapat menunjang terciptanya struktur pembiayaan pembangunan yang bertumpu pada kemampuan sendiri sebagaimana ditetapkan dalam GBHN. Upaya untuk membentuk tabungan pemerintah sebesar-besarnya di satu pihak berkaitan erat dengan upaya untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri, dan di lain pihak berkaitan dengan efisiensi pengeluaran rutin.

Kenaikan rata-rata tabungan pemerintah per tahun dalam Pelita I mencapai 77,0 persen, sedangkan dalam Pelita II dan Pelita III masing-masing mencapai 54,4 persen dan 34,8 persen. Selama empat Pelita, tabungan pemerintah tertinggi pernah tercapai dalam tahun 1985/1986 yaitu sebesar Rp 7.301,3 milyar. Sejalan dengan peningkatan tersebut, peranan tabungan

pemerintah dalam pembentukan dana pembangunan juga semakin besar. Apabila pada awal Pelita I, tabungan pemerintah merupakan 23,0 persen dari dana pembangunan, maka dalam tahun 1981/1982 peranannya meningkat menjadi 75,4 persen. Faktor penting yang memberikan tekanan berat terhadap peningkatan tabungan pemerintah adalah meningkatnya pengeluaran bagi pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri.

UNIVERSITAS TERBUKA

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a) Mengetahui berapa besar sumbangan pajak dari sub sektor non migas terhadap pengeluaran pemerintah dan bagaimana trendnya.
- b) Mengetahui berapa besar sumbangan pajak dari sektor migas terhadap pengeluaran pemerintah dan bagaimana trendnya.
- c) Mengetahui berapa besar proporsi pembayaran cicilan pokok dan bunga hutang luar negeri terhadap pengeluaran rutin pemerintah.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi: untuk bahan masukan bagi penulisan modul Ekonomi Makro maupun modul Ekonomi Pembangunan.

METODE PENELITIAN

Data Yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang didapat dari Nota Keuangan dan RAPBN tahun 1990/1991 data BPS. Periode observasi dari tahun 1969/1970 sampai dengan 1989/1990, untuk mengetahui data penerimaan pajak migas maupun non migas dan pengeluaran pemerintah dari tahun ke tahun pembayaran cicilan pokok dan bunga hutang luar negeri.

Metode yang digunakan adalah metode statistik trend linier dan non linier. Dengan metode ini akan dapat diketahui:

- a. Perkembangan penerimaan pajak non migas.
- b. Perkembangan penerimaan pajak migas.
- c. Perkembangan pembayaran cicilan pokok dan bunga hutang luar negeri.
- d. Perkembangan proporsi pembayaran cicilan pokok dan bunga hutang luar negeri terhadap pengeluaran pemerintah.

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

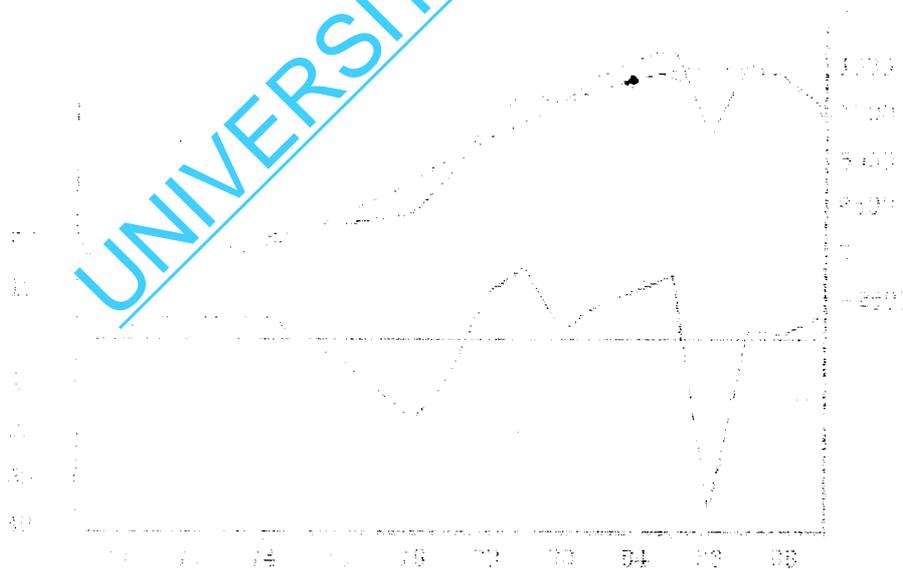
1. Penerimaan Migas

Dari hasil perhitungan trend nono linier dengan menggunakan komputer diperoleh hasil.

Penerimaan Migas:

$$\begin{aligned}
 Y &= a + bX_1 + cX_1^2 + dX_1^3 \\
 &= 1706,3 - 1243,9t + 213,3t^2 - 6,59t^3 \\
 &\quad (1,35) \quad (-2,66) \quad (4,53) \quad (-4,84)
 \end{aligned}$$

Bila digambarkan, hasilnya adalah:



Keterangan Gambar

Dalam tahun 1969/70 (Pelita I) peranan penerimaan migas belum berarti karena harga ekspor minyak pada saat itu masih sangat rendah yaitu berkisar pada harga sebesar US \$ 1,67 per barel.

Selanjutnya pada awal Pelita II, harga minyak bumi mulai menunjukkan peningkatan hingga mencapai harga US \$ 11,70 per barel, yang berarti dalam jangka 5 tahun telah meningkat dengan 600 persen lebih.

Dengan adanya peningkatan harga minyak tersebut, maka peranan penerimaan migas mulai meningkat, sehingga dalam Pelita II telah melebihi peranan penerimaan di luar migas. Kalau pada awal Pelita I penerimaan migas baru mencapai sebesar Rp 65,8 milyar atau sekitar 27% dari seluruh penerimaan dalam negeri, maka pada akhir Pelita II telah meningkat menjadi Rp 2.308,7 milyar atau 54,1 persen dari seluruh penerimaan dalam negeri. Peningkatan harga minyak tersebut berlangsung terus hingga mencapai harga tertinggi sebesar US \$ 35,00 per barel dalam tahun 1981.

Selama Pelita III peranan penerimaan minyak bumi dan gas alam, semakin mantap, sehingga dalam tahun 1981/1982 peranan migas mencapai sekitar 70 persen dari seluruh penerimaan dalam negeri. Kalau dalam beberapa pelita sebelumnya peranan penerimaan migas menunjukkan perkembangan yang meningkat, maka memasuki Pelita IV penerimaan migas menunjukkan perkembangan yang berbeda. Harga minyak di pasaran internasional mulai melemah sejak tahun 1982, bahkan mencapai harga terendah yaitu sebesar US \$ 9,83 per barel dalam bulan Agustus 1986.

Keadaan tersebut mengakibatkan menurunnya jumlah dan peranan penerimaan negara dari sektor minyak bumi dan gas alam secara tajam. Penurunan harga minyak mentah di pasaran dunia tersebut telah mendorong negara-negara OPEC untuk menyepakati penentuan quota produksi bagi masing-masing negara anggota. Hasil yang dicapai terlihat dari harga minyak yang mulai mantap kembali, dan penerimaan negara dari migas meningkat menjadi Rp 10.047,2 milyar dalam tahun 1987/1988. Namun demikian kemantapan harga minyak tersebut tidak dapat bertahan lama karena kembali dibayangi dengan keadaan yang tidak menentu, sebagai akibat adanya sementara negara anggota OPEC yang tidak mematuhi kesepakatan quota produksi. Akibatnya penerimaan migas tahun 1988/1989 hanya mencapai sebesar Rp 9.527,0 milyar. Mengingat fluktuasi harga minyak yang demikian besar dan penuh ketidakpastian, maka disadari bahwa ketergantungan penerimaan dalam negeri dari sektor minyak bumi dengan alam harus dihindari. Untuk itu pemerintah mengupayakan pengolahan penerimaan dalam negeri dari sektor di luar minyak bumi dan gas alam.

2. Penerimaan Non Migas

Dari hasil perhitungan trend non linier dengan menggunakan komputer hasil:

Penerimaan non migas:

$$\text{Non migas} = -187,89 + 263,63t - 31,54t^2 + 2,56t^3$$

$$(-0,38) \quad (1,96) \quad (-2,34) \quad (6,57)$$

Bila digambarkan, hasilnya adalah



Keterangan Gambar

Tekad untuk menegakkan kemandirian dalam membiayai pembangunan, terutama yang bersumber dari penerimaan negara di luar minyak bumi dan gas alam telah direalisasikan oleh pemerintah melalui pembaharuan di bidang perpajakan. Sebagai hasil dari berbagai kebijaksanaan yang telah ditempuh di bidang perpajakan tersebut, penerimaan dalam negeri dari sektor perpajakan meningkat dari sebesar Rp 174,8 milyar dalam tahun 1969/1970 (awal Pelita I) menjadi sebesar Rp 729,9 milyar pada tahun 1974/1975 (awal Pelita II). Peningkatan ini terus berlanjut sehingga mencapai

sebesar Rp 11.908,5 milyar dalam tahun 1988/1989, yang merupakan tahun terakhir Pelita IV.

Selanjutnya dalam APBN 1989/1990 penerimaan berupa pajak direncanakan sebesar Rp 14.909,6 milyar atau 25,2% dibandingkan dengan penerimaan pajak dalam tahun 1988/1989. Dengan berbagai kendala dan potensi yang ada, maka penerimaan dalam negeri yang merupakan faktor penentu bagi pembentukan tabungan pemerintah telah dapat ditingkatkan dalam jumlah yang cukup berarti. Penggeseran dalam komponen penerimaan dalam negeri dari dukungan utama penerimaan minyak bumi dan gas alam kepada dukungan utama penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam telah menyebabkan struktur penerimaan Pelita I sebesar Rp 967,7 milyar yang terdiri dari penerimaan minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 362,2 milyar atau 39,5 persen dari total penerimaan dalam negeri dan penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 585,5 milyar atau 60,5 persen dari keseluruhan penerimaan dalam negeri.

Komposisi ini kemudian berubah pada tahun pertama Pelita II dimana 54,6 persen daripada penerimaan dalam negeri merupakan penerimaan minyak bumi dan gas alam yaitu sebesar Rp 957,2 milyar, sedangkan yang 45,4 persen atau sebesar Rp 796,5 milyar merupakan penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam. Dalam tahun-tahun berikutnya, penerimaan dalam negeri lebih banyak ditopang oleh penerimaan dan sektor minyak bumi dan gas alam seperti misalnya dalam tahun 1985/1986 yang merupakan tahun kedua Pelita IV, penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam mencapai 57,9 persen dari seluruh penerimaan dalam negeri. Dengan turunnya

harga minyak bumi secara drastis dalam tahun 1986 dan juga makin meningkatnya penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam sebagai hasil dari pembaharuan perpajakan, maka sejak tahun 1986/1987 penerimaan dalam negeri sebagian besar diperoleh dari penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam, khususnya dari sektor perpajakan. Dalam tahun 1986/1987 dari keseluruhan penerimaan dalam negeri 60,7 persen merupakan penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam, sedangkan penerimaan minyak bumi dan gas alam sebesar 39,3 persen. Lebih besarnya peranan penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam terhadap keseluruhan penerimaan dalam negeri diharapkan terus berlanjut. Sehingga dalam APBN 1989/1990 penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam direncanakan sebesar 31,3 persen dari penerimaan dalam negeri.

3. Pembayaran Bunga dan Cicilan Pokok (Cicilan Bunga)

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan komputer diperoleh hasil untuk pembayaran bunga.

$$= 1881,34 - 746,85t + 54,66t^2$$

$$(2,72) \quad (-5,29) \quad (8,93)$$

Bila digambarkan hasilnya adalah:



Keterangan Gambar

Dalam tahun pertama Pelita I beban pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri baru mencapai sebesar 5,9 persen dari anggaran belanja rutin. Namun sejak tahun anggaran 1986/1987, beban pembayaran kembali pinjaman luar negeri tersebut telah menyerap lebih dari sepertiga anggaran belanja rutin, bahkan dalam tahun anggaran 1988/1989 pembayaran hutang luar negeri telah mencapai 52,4 persen.

Peningkatan ini terutama disebabkan oleh: peningkatan nilai tukar antara valuta, yaitu depresiasi dolar Amerika terhadap Yen Jepang, Mark Jerman dan beberapa mata uang kuat lainnya, adanya devaluasi rupiah sebesar 38,0 persen dalam tahun 1983 dan sebesar 45,0 persen dalam tahun 1986, disamping meningkatnya

jumlah pembayaran kembali hutang luar negeri yang jatuh tempo. Perkembangan tersebut telah memberikan tekanan yang cukup berat terhadap APBN dan neraca pembayaran. Oleh karena beban pembayaran kembali hutang luar negeri telah menyebabkan peningkatan pengeluaran rutin dalam jumlah cukup besar, maka tabungan pemerintah yang dapat dihimpun sebagai sumber dana pembangunan juga menjadi terbatas khususnya karena penerimaan dalam negeri menurun dengan tajam akibat penurunan harga minyak bumi dalam negeri menurun dengan tajam akibat penurunan harga minyak bumi dalam tahun 1986. Dari sudut neraca pembayaran, peningkatan kewajiban pembayaran hutang luar negeri di satu pihak, dan penurunan nilai ekspor secara keseluruhan karena menurunnya nilai ekspor minyak bumi dan gas alam di lain pihak, telah mengakibatkan meningkatnya rasio pembayaran hutang luar negeri terhadap ekspor (debt-service-ratio).

Meskipun demikian pembayaran kembali bunga dari cicilan pokok hutang luar negeri tersebut tetap mendapat prioritas tinggi dalam pengeluaran negara, oleh karena perangguhan atau penundaan pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri tidak hanya akan memperberat beban anggaran belanja negara dikemudian hari, tetapi juga akan menurunkan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, serta menimbulkan masalah-masalah lain yang lebih merugikan pembangunan ekonomi di masa depan.

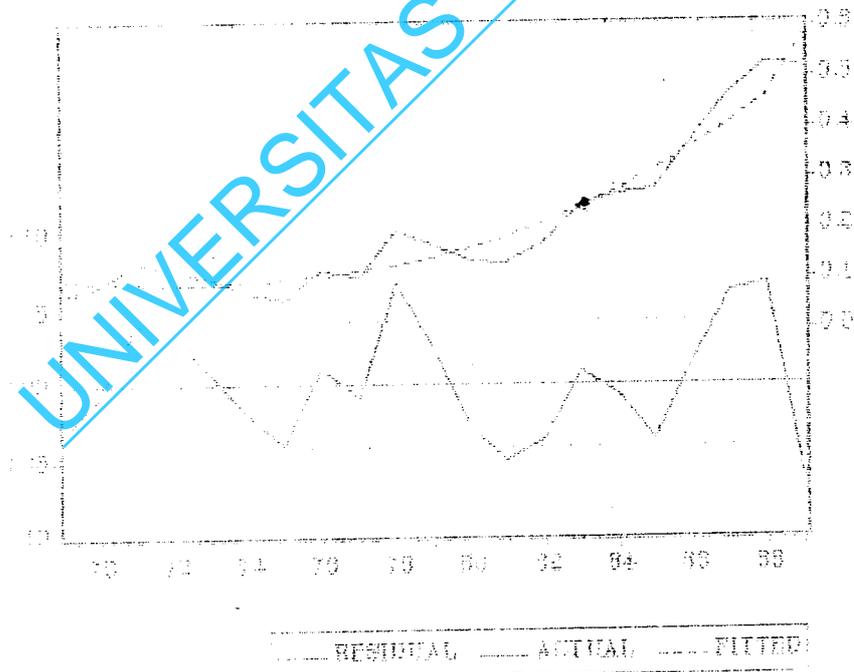
4. Perbandingan Pembayaran Bunga Terhadap Pengeluaran Rutin

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan komputer diperoleh hasil pembayaran bunga terhadap pengeluaran rutin:

$$\text{Prop} = 0,1047814 - 0,0058304t + 0,0004439t^2 + 3,69$$

(2,45)
(-0,37)
(0,28)
(0,80)

Bila digambarkan, hasilnya adalah:



Keterangan Gambar

Sejalan dengan perkembangan volume kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat daripada kemajemukan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan, maka jumlah dan peranan pengeluaran rutin dalam APBN telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Dalam tahun pertama Pelita I yaitu 1969/1970 pembayaran bunga dibiayai 10% dari pengeluaran rutin dan semakin lama semakin meningkat. Hingga pada tahun 1989, pembayaran bunga dibiayai dari pengeluaran rutin sebanyak kurang lebih 60%. Proporsi yang semakin besar dari pengeluaran rutin yang digunakan untuk pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri menunjukkan beban yang semakin berat yang harus ditanggung pemerintah. Bila hal ini terus berlanjut maka hutang luar negeri yang diperoleh tidak banyak bermanfaat untuk pembangunan secara langsung karena akan mengalir lagi ke luar negeri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penerimaan Migas

- a) Pada Pelita I tahun 1969/1970 penerimaan migas Rp 65,8 milyar atau \pm 27% dari seluruh penerimaan dalam negeri.
- b) Pelita II meningkat menjadi rp 2.308,7 milyar atau 54,1%.
- c) Tahun 1981 meningkat mencapai harga tertinggi yaitu sebesar US \$ 35.00 per barel.
- d) Pelita III, pada tahun 1981/1982 mencapai sebanyak 70%.
- e) Pada Pelita IV, harga minyak pasaran mulai melemah sejak 1982 dan mencapai harga terendah yaitu US \$ 9.83 per barel 1986.
- f) Untuk Indonesia tahun 1987/1988 penerimaan migas mencapai Rp 10.047,2 milyar sebab ada penentuan kuota produksi bagi anggota OPEC.
- g) 1988/1989 Indonesia hanya Rp 9.527,0 milyar sebab beberapa negara OPEC tidak memenuhi kesepakatan kuota produksi yang ditentukan oleh OPEC.

2. Penerimaan Non Migas

Tahun 1969/1970 penerimaan dalam negeri dari sektor perpajakan sebesar Rp 174,8 milyar dan meningkat menjadi Rp 729,9 milyar pada tahun 1971/1975 (Pelita II).

Pada tahun 1988/89 (Pelita IV) mencapai sebesar Rp 11.908,5 milyar. Dalam APBN 1989/1990 direncanakan

sebesar Rp 14.909,6 milyar atau 25,2% dibandingkan penerimaan pajak tahun 1988/1989.

3. Pengeluaran Pemerintah

Pertumbuhan pengeluaran pemerintah, dari Pelita I sampai dengan awal Pelita V menunjukkan peningkatan yang cukup besar/tinggi, yaitu:

Pada Pelita I rata-rata pengeluaran rutin pemerintah:

Pelita I = 362,04 milyar rupiah

Pelita II = 1773,82 milyar rupiah

Pelita III = 6449,46 milyar rupiah

Pelita IV = 14.628,18 milyar rupiah

Pelita V awal 89/90 = 23.445,0 milyar rupiah.

Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya pembayaran kembali hutang luar negeri sebesar Rp 12.236,8 milyar, disamping semakin besarnya dukungan pembiayaan yang diperlukan bagi pendayagunaan aparatur pemerintah, pengoperasian, pengawasan dan pemeliharaan proyek-proyek pembangunan yang telah selesai dibangun serta subsidi untuk menjaga kestabilan harga dan ekonomi.

- Pada Pelita I, ada pergeseran dari penerimaan minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 967,7 milyar yang terdiri dari penerimaan minyak dan gas alam Rp 362,2 milyar atau 39,5% dan penerimaan di luar minyak dan gas alam sebesar Rp 585,5 milyar atau 60,5 persen.
- Pada pelita II 54,6 persen merupakan penerimaan minyak bumi dan gas alam yaitu sebesar Rp 957,2 milyar sedangkan 45,4 persen atau Rp 769,5 milyar dari bukan minyak.

Dalam Pelita IV penerimaan minyak bumi dan gas alam mencapai 57,9 persen (tahun 1985/86).

- Tahun 1986/87 60,7 persen merupakan penerimaan di luar minyak, sedangkan 39,3 persen dari minyak.

4. Pembayaran Bunga dan Cicilan Pokok

Pada Pelita I beban pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri sebesar 5,9 persen dari anggaran belanja rutin.

- Tahun 1986/87 menyerap sepertiga dari anggaran belanja rutin.
- Tahun 1988/89 mencapai 52,4 persen merupakan tekanan yang berat terhadap APBN dan neraca pembayaran.

Akibatnya tabungan pemerintah menjadi terbatas dan juga meningkatnya rasio pembayaran hutang luar negeri terhadap ekspor (debt service ratio).

5. Perbandingan Pembayaran Bunga Terhadap Pengeluaran Rutin

Dalam Pelita I 1969/1970 pembayaran cicilan pokok bunga dibiayai 10% dari pengeluaran rutin. Proporsi ini harus meningkat dari tahun ke tahun.

Pada tahun 1989 proporsi pembayaran cicilan pokok dan bunga dibiayai dari pengeluaran rutin ± sebanyak 60%.

Saran-Saran

Dengan melihat perkembangan-perkembangan di atas yaitu selama tahun 1969 sampai dengan 1990 baik dari penerimaan minyak dan non minyak disarankan agar pemerintah lebih menggalakkan lagi ekspor non migas sebab melihat fluktuasi harga minyak yang tidak menentu, otomatis pemerintah harus memacu penerimaan dibidang non migas misalnya dalam bidang:

- Permodalan
- Lisensi (perizinan)
- Pajak
- Dan lain-lain.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

Moh. Arsyad, Sri Edi Swasono, Iwan Jaya Azis: Ekonomi Indonesia, Masalah dan Prospek 1989/1990. Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta 1989.

Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1990/1991. Biro Perencanaan Makro dan Studi Kuantitatif, Bappenas 1990.

Sutrisno Prawiro H, Ekonomi Publik 1, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka 1986.

UNIVERSITAS TERBUKA

obs	BUNGA	BUNGA	TOTAL	NMIGAS	MIGAS
1969	14.40000	14.40000	216.5000	177.9000	65.80000
1970	25.60000	25.60000	388.2000	245.5000	99.20000
1971	46.60000	46.60000	349.1000	287.3000	140.7000
1972	53.40000	53.40000	438.1000	360.1000	230.5000
1973	70.70000	70.70000	713.3000	585.5000	382.2000
1974	73.70000	73.70000	1016.100	796.5000	957.2000
1975	78.50000	78.50000	1332.600	993.9000	1248.000
1976	189.5000	189.5000	1629.800	1270.700	1635.300
1977	228.3000	228.3000	2148.900	1586.700	1948.700
1978	534.5000	534.5000	2743.700	1957.400	2308.700
1979	684.1000	684.1000	4061.800	2437.200	4259.600
1980	784.8000	784.8000	5800.000	3207.400	7019.600
1981	931.1000	931.1000	6977.600	3584.800	8627.800
1982	1224.500	1224.500	6996.300	4247.900	8170.400
1983	2102.600	2102.600	8411.800	4912.500	9520.200
1984	2776.500	2776.500	10322.20	5475.600	10429.90
1985	3323.100	3323.100	11951.50	8108.400	11144.40
1986	5058.100	5058.100	13559.30	9803.000	6337.600
1987	8204.600	8204.600	17481.50	10756.10	10047.20
1988	10940.20	10940.20	20739.00	13477.30	9527.000
1989	12236.80	12236.80	23445.00	17350.10	7899.700

obs	PBUNGA	PMIGAS	PNMIGAS
1969	0.666513	0.303926	0.821709
1970	0.088827	0.344205	0.851839
1971	0.133486	0.403036	0.822973
1972	0.121890	0.526136	0.821958
1973	0.099117	0.535819	0.820833
1974	0.072532	0.942033	0.783880
1975	0.058907	0.936515	0.745835
1976	0.116273	1.003375	0.779666
1977	0.106240	0.906836	0.738378
1978	0.194610	0.841455	0.713416
1979	0.168423	1.048698	0.600030
1980	0.135310	1.210276	0.553000
1981	0.133441	1.236500	0.513758
1982	0.175021	1.167817	0.607164
1983	0.249958	1.131767	0.584001
1984	0.268953	1.010434	0.530468
1985	0.278049	0.932469	0.678442
1986	0.373035	0.467399	0.722973
1987	0.169330	0.574733	0.615285
1988	0.527518	0.459376	0.649853
1989	0.521936	0.336946	0.740034

Sumber: Nota Keuangan

VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
C	1706.3021	1266.3694	1.3473968	0.196
TAHUN	1143.8755	468.08165	-2.6573903	0.017
TAHUN2	311.29461	47.049702	4.5333892	0.000
TAHUN3	-6.6873387	1.3606347	-4.8413721	0.000
R-squared	0.924684	Mean of dependent var		4857.129
Adjusted R-squared	0.911895	S.D. of dependent var		4156.870
S.E. of regression	1237.369	Sum of squared resid		26028003
Durbin-Watson stat	1.838555	F-statistic		89.57800
Log likelihood	-177.1144			

VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
C	-187.88732	362.96658	-0.5176436	0.611
TAHUN	263.62893	134.16148	1.9650131	0.066
TAHUN2	41.544625	13.485377	-2.3391771	0.032
TAHUN3	2.5609409	0.3899849	6.5667701	0.000
R-squared	0.995489	Mean of dependent var		4362.943
Adjusted R-squared	0.994670	S.D. of dependent var		4857.634
S.E. of regression	354.6518	Sum of squared resid		2138224.
Durbin-Watson stat	1.960775	F-statistic		1245.035
Log likelihood	-150.8728			

VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
C	1881.3395	692.01792	2.7186283	0.014
TAHUN	-746.84574	141.30157	-5.2854737	0.000
TAHUN2	54.603591	6.1229007	8.9277277	0.000
R-squared	0.937040	Mean of dependent var		2361.029
Adjusted R-squared	0.930044	S.D. of dependent var		3689.735
S.E. of regression	975.9043	Sum of squared resid		17143007
Durbin-Watson stat	0.625902	F-statistic		133.9472
Log likelihood	-172.7298			

VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
C	0.1047814	0.0428198	2.4470336	0.026
TAHUN	-0.0058304	0.0158273	-0.3683762	0.717
TAHUN2	0.0004439	0.0015909	0.2790548	0.784
TAHUN3	3.695E-05	4.601E-05	0.8030989	0.433
R-squared	0.932155	Mean of dependent var		0.207600
Adjusted R-squared	0.920183	S.D. of dependent var		0.148092
S.E. of regression	0.041839	Sum of squared resid		0.029758
Durbin-Watson stat	1.462194	F-statistic		77.85750
Log likelihood	39.07356			